

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. a. Komunikasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan secara efektif. Para pelaksana kebijakan selayaknya mengetahui secara tepat apa yang akan mereka kerjakan. Proses Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata sudah cukup baik yaitu dengan mengadakan Sosialisai, himbauan-himbauan dan rapat-rapat dengan Dinas-dinas dan instansi yang terkait untuk melakukan penerapan kebijakan cara penyampaiannya yaitu secara langsung dan tidak langsung, untuk penyampaiannya dengan cara sosialisasi sifatnya periodik itu rutin satu minggu sekali menyampaikan tentang kebijakan SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata yaitu mengsosialisasikan kegiatan apasaja yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperairan umum waduk cirata, tetapi cara penyampaian Badan Pengelola kepada petani keramba jaring apung belum cukup optimal, karena para petani keramba jaring apung kurang menanggapi sosialisasi dari Badan Pengelola tentang Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata.
 - a. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang tidaklah pentingnya. Ketiadaan sumberdaya atau kurang optimalnya potensi sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan.

Sumber sumber yang penting meliputi sumberdaya manusia yang memadai serta keahlian keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan Wewenang serta fasilitas - fasilitas yang diperlukan. Badan Pengelola sudah sangat optimal dalam bidang sumberdaya misalkan dalam sumberdaya manusia sudah memadai dan melaksanakan tugas dengan baik. fasilitas yang dimiliki oleh Badan Pengelola untuk melaksanakan penerapan kebijakan sudah memadai dan adanya anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata dalam melaksanakan penerapan kebijakan contohnya untuk penarikan KJA yang sudah rusak dan menjadi sampah, penarikan KJA yang sudah ditinggal pemiliknya.

b. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi efektivitas implementasi kebijakan. Disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Sikap dari Badan Pengelola Waduk Cirata sudah cukup baik dalam melaksanakan penerapan kebijakan sudah tersampaikan kepada para pelaksana kegiatan budidaya ikan tetapi sikap para pelaksana yaitu dari petani KJA masih kurang peduli kepada kebijakan yang ada mereka masih belum tergugah untuk taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi mengenai SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata para pengusaha atau para petani KJA mementingkan hasil tetapi tidak mementingkan apa dampak yang ditimbulkan, misalkan dengan semakin banyaknya KJA yang terdapat di waduk cirata sudah over populasi

dan berdampak kepada lingkungan waduk, kualitas air waduk dan banyak dampak lainnya.

c. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugas. Dalam rangka mengelola Waduk Cirata BPWC memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan secara profesional (mengelola, memelihara dan mengembangkan potensi ekonomi), asset berupa lahan-lahan disekitarnya yang terletak di waduk Cirata tanpa mengabaikan kepentingan Unit Pembangkitan dan masyarakat yang mempergunakan sungai dan waduk tersebut. Berbagai jenis kegiatan dilakukan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, meliputi pemantauan dan pembersihan perairan dari gulma air dan sampah serta pemeliharaan trashboom sebagai sekat sampah di setiap Sub Das Cirata, pemantauan kualitas air dan sedimentasi serta berbagai penelitian tentang lingkungan waduk Cirata, kegiatan penghijauan dan reboisasi di wilayah *greenbelt* dan *catchment area* waduk Cirata, penyuluhan masalah ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kegiatan masyarakat di waduk dan sekitarnya, pemeliharaan asset lahan dengan perapatan patok batas tanah milik PLN, batas perairan, dan pemasangan rambu-rambu peringatan. Pegawai BPWC bertanggung jawab dalam menerapkan kegiatan pemanfaatan perairan umum, dan penyelesaian keluhan, serta persoalan internal agar dapat berjalan dengan lebih cepat, tepat, dan efektif. Ketika kegiatan pemanfaatan perairan umum mengena semakin meningkatnya Keramba Jaring Apung yang

melebihi kapasitas yang sudah ditentukan dalam kebijakan, maka banyak masyarakat yang komplain menganggap kinerja BPWC lamban, tetapi pegawai BPWC memberi perhatian lebih dengan menjelaskan apa penyebab dari semakin meningkatnya populasi KJA yang ada di Waduk Cirata tersebut.

2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemanfaatan perairan umum oleh petani keramba jaring apung adalah Berbagai jenis kegiatan dilakukan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, meliputi pemantauan dan pembersihan perairan dari gulma air dan sampah serta pemeliharaan trashboom sebagai sekat sampah disetiap Sub Das Cirata, pemantauan kualitas air dan sedimentasi serta berbagai penelitian tentang lingkungan waduk Cirata, kegiatan penghijauan dan reboisasi di wilayah *greenbelt* dan catchment area waduk Cirata, penyuluhan masalah ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kegiatan masyarakat di waduk dan sekitarnya, pemeliharaan asset lahan dengan perapatan patok batas tanah milik PLN, batas perairan, dan pemasangan rambu-rambu peringatan.

Keberadaan waduk di suatu wilayah diperlukan mengingat waduk mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya waduk ternyata memberikan dampak positif dan dampak negative terhadap lingkungan. Dampak positif yang dapat diberikan oleh adanya waduk Cirata adalah tersedianya energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air dan pengendalian banjir saat hujan turun. Selai itu waduk Cirata juga dimanfaatkan untuk pengairan dari aktivitas pertanian perikanan juga bahan baku air minum masyarakat perkotaan, seumpama Jakarta. Secara luas

keberadaan waduk Cirata dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemanfaatan perairan umum oleh petani keramba jaring apung adalah dari adanya waduk Cirata yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati perairan sungai.
 - a. Penurunan kualitas air akibat aktivitas penggundulan hutan di daerah Bajabang dan Citatah Kecamatan Cipeundeuy yang mengakibatkan pendangkalan waduk.
 - b. Selain itu juga, kegiatan usaha yang berlebihan seperti banyaknya keramba jaring apung untuk budidaya ikan menyebabkan tingginya kandungan bahan organik akibat menumpuknya sisa pakan ikan yang terbuang.
 - c. Jumlah jaring apung sudah melewati batas kelayakan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang penggunaan wilayah.
 - d. Hal ini dapat dikategorikan bahwa waduk Cirata sudah tidak sesuai dengan peruntukkan.
 - e. Jaring apung, misalnya di daerah Citatah Cirata juga dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan warung-warung yang menimbulkan limbah sampah.
2. Upaya-Upaya yang dilakukan
 - a. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian Kawasan Waduk Cirata pada bagian komunikasi yang terjadi antara Pemanfaatan Perairan Umum Oleh Petani Keramba Jaring

Apung adalah melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung dan menyampaikan surat undangan pemberitahuan kepada para petani Keramba Jaring Apung dalam melakukan kegiatan budidaya ikan lebih baik lagi, guna meningkatkan kualitas ikan yang lebih baik dan kelestarian lingkungan kawasan Waduk Cirata. Namun, walaupun sudah melakukan cara tersebut, kenyataannya masih banyak para petani keramba jaring apung yang tidak mengetahui tentang kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian Kawasan Waduk Cirata dikarenakan perilaku para petani keramba jaring apung yang seakan-akan tidak peduli dengan adanya kebijakan tersebut serta cara penyampaian seperti sosialisasi langsung ke lapangan untuk melihat budidaya ikan dengan kontruksi KJA melakukan kegiatan antara komunikator dan komunikan baik secara kelompok maupun individual.

- b. Bagian sumber daya peralatan yang mendukung Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian Kawasan Waduk Cirata sudah termasuk cukup dalam melakukan kegiatan budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung. Walaupun sarana prasarana sudah termasuk cukup, tetapi masih belum optimal dalam menerapkan kebijakan, sehingga pemanfaatan perairan umum oleh petani keramba jaring apung menjadi lebih baik.
- c. Selanjutnya kecenderungan karyawan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan kecukupan karyawan serta loyalitas dalam bekerja masih ada kecenderungan karyawan dalam menjalankan kebijakan sesuai yang diberikan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata. Oleh karenanya kinerja

karyawan lebih ditingkatkan lagi, guna memperlancar kegiatan budidaya ikan yang baik dan kompeten dengan budaya kerja yang produktif, kreatif, serta dapat bergerak cepat dan tepat.

- a. Semua pelaksana dalam struktur birokrasi di Badan Pengelola Waduk Cirata sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan job descriptionnya yang mereka terima demi terlaksananya visi dan misi badan pengelola.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian, dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

5.2.1 Saran Praktis

- (1). Pemerintah seharusnya lebih berperan aktif dalam permasalahan over populasi Keramba Jaring Apung (KJA) yang semakin meningkat dan berdampak cukup buruk terhadap perairan waduk.
- (2). Sebaiknya ada kebijakan pendamping berupa sosialisasi dan edukasi untuk mengimplementasikan penerapan kebijakan untuk mengurangi populasi Keramba Jaring Apung (KJA) yang semakin meningkat.
- (3). Seharusnya dilakukan pengawasan yang rutin agar populasi Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di waduk cirata tidak terus tumbuh tiap tahunnya.

- (4). Pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan mengenai semakin meningkatnya populasi Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata karena dampak kepada usia waduk.

5.2.2 Saran Teoritis

Dimasa yang akan datang apabila ada yang melakukan penelitian dengan variabel yang sama disarankan dapat melihat lebih jauh Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata, diantaranya melalui pengujian teori Implementasi Kebijakan dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi sehingga dapat memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan.